

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi tumbuh sangat pesat yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan dituntut untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya memerlukan sebuah sistem informasi kesehatan lintas sektor seperti yang tertuang dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan primer, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan diwajibkan untuk menerapkan SIMPUS sesuai dengan Permenkes nomor 75 Tahun 2014 Pasal 43 dan 44.

Terjadinya otonomi daerah mempengaruhi tatanan sistem yang ada di pemerintahan daerah termasuk bidang kesehatan. Dengan adanya otonomi daerah, penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) menjadi tanggung jawab masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Seiring waktu, keanekaragaman bentuk sistem informasi manajemen puskesmas tidak dapat dihindari yang menyebabkan timbulnya masalah seperti kurang terintegrasinya data. Selain itu, belum adanya kebijakan standar yang secara khusus mengatur sistem informasi manajemen puskesmas yang mengakibatkan melemahnya tingkat ketegasan sebuah sistem, (Depkes, 2012a).

Beberapa masalah yang menjadi prioritas dalam rencana pengembangan dan penguatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Indonesia diantaranya adalah terbatasnya dukungan sumber daya, terutama sumber daya manusia yang merupakan peran utama dalam mengembangkan sistem informasi kesehatan. Selain itu, kendala lainnya adalah terbatasnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sarana dan prasarana, serta pembiayaan dalam pengadaan komponen penunjang penerapan sistem informasi kesehatan. Demikian pula halnya pada penggunaan data dan informasi yang dihasilkan belum sepenuhnya digunakan dengan semestinya. Prioritas utama yang menjadi masalah dalam rencana pengembangan dan penguatan sistem informasi kesehatan adalah masih terbatasnya kemampuan pengelolaan sistem informasi kesehatan terutama dalam hal landasan hukum, kerja sama dan koordinasi, (Depkes, 2012b).

Penerapan sistem informasi dapat memberikan berbagai jenis informasi yang dibutuhkan, yang tentunya dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam merencanakan, memulai, mengatur, dan mengendalikan sistem dari sebuah organisasi. Selain itu sistem informasi juga akan memberikan sinergi selama prosesnya terhadap organisasi dan hal tersebut akan meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil/output. Sering kali ketidakberhasilan dalam pengembangan sistem informasi tersebut, lebih disebabkan dari segi perencanaan sumber daya organisasi yang kurang baik, dimana identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan dalam implementasi sistem informasi tersebut kurang lengkap dan menyeluruh, (Gaol, 2008).

Dalam penelitian Suryani (2013) menyebutkan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan terpadu di Puskesmas Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, keseluruhannya masih menggunakan metode manual. Hal ini dikarenakan tidak ada koordinasi, tidak tersedianya buku petunjuk, energi listrik yang tidak stabil dan tidak adanya tunjangan khusus untuk para pegawai pengolah data dalam menerapkan SIMPUS. Tidak adanya koordinasi antar tim kesehatan merupakan penyebab utama kegagalan dalam penerapan SIMPUS. Pada penelitian Wulandari (2009) telah menyebutkan penggunaan SIMPUS di Kota Semarang dari 37 puskesmas 24 diantaranya tidak menggunakan SIMPUS dikarenakan Dinas Kesehatan Kota masih meminta pelaporan data puskesmas memakai prosedur lama (manual) karena antara puskesmas dan dinas kesehatan belum terintegrasi.

Hasil survey dokumentasi laporan yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa pada akhir tahun 2014, Puskesmas Boyolali berjumlah 29 unit, pernah menerapkan aplikasi SIMPUS Jojak pada tahun 2002. Aplikasi yang saat itu digunakan adalah SIMPUS Rawat Jalan dengan model aplikasi *single user* (Penerapan SIMPUS yang hanya pada bagian registrasi). Aplikasi SIMPUS tersebut digunakan untuk memasukan data register pasien dengan menggunakan satu unit komputer dan satu orang operator. Penerapan SIMPUS dengan model *single user* secara khusus dilakukan untuk menyesuaikan dengan keterbatasan perangkat komputer yang tersedia di tiap puskesmas pada saat itu.

Penerapan SIMPUS saat itu dapat berjalan lancar walau dengan segala keterbatasan yang terdapat di hampir semua puskesmas. Namun hal tersebut tidak dapat bertahan lama, dikarenakan beberapa masalah yang timbul seperti kurang memadainya perangkat keras baik dari segi kualitas maupun kuantitas seiring kompleksitas data, kurangnya operator/sumber daya manusia yang kompeten dalam mengeksekusi data, bahkan pengadaan model SIMPUS dengan model aplikasi lain. Dari beberapa masalah tersebut dapat diidentifikasi bahwa kurangnya dukungan beberapa unsur manajemen menghambat jalannya penerapan SIMPUS.

Pada tahun 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali kembali menerapkan SIMPUS dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mitra dalam proses pengadaan *software* dan bimbingan teknis penggunaan SIMPUS. Dalam mengaktifkan kembali sebuah sistem, tentu tidak terlepas dari unsur-unsur manajemen yang harus lebih diperhatikan, agar tujuan dapat dicapai dengan optimal. Unsur-unsur tersebut dikenal dengan istilah 5M (*man, money, material, machines* dan *method*). Kelima unsur tersebut merupakan elemen dasar dalam melakukan fungsi sebuah sistem. Dari ulasan beberapa penyebab yang teridentifikasi, diperlukan data statistik untuk menguatkan data sebelumnya sekaligus melihat hubungan dari penyebab masalah yang telah teridentifikasi. Hal tersebut menjadikan peneliti tertarik menganalisis hubungan unsur manajemen dengan penerapan SIMPUS di Kabupaten Boyolali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut “Hubungan Unsur Manajemen dengan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas di Kabupaten Boyolali”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum:

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan unsur-unsur manajemen dengan penerapan SIMPUS di Kabupaten Boyolali Tahun 2015.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan unsur sumber daya manusia (*Man*) dengan penerapan SIMPUS
- b. Mengetahui hubungan unsur dana/keuangan (*Money*) dengan penerapan SIMPUS
- c. Mengetahui hubungan unsur material (*Material*) dengan penerapan SIMPUS
- d. Mengetahui hubungan unsur mesin (*Machine*) dengan penerapan SIMPUS
- e. Mengetahui hubungan unsur metode (*Method*) dengan penerapan SIMPUS

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini :

1. Bagi Dinas Kesehatan

Sebagai informasi gambaran umum penerapan SIMPUS di kabupaten Boyolali dan penguatan informasi dalam mengambil keputusan/kebijakan di tingkat dinas kesehatan.

2. Bagi Kepala Puskesmas

Sebagai media informasi untuk perbandingan dan gambaran umum keadaan di Puskesmas di Kabupaten Boyolali.

3. Bagi pengembang ilmu pengetahuan

Sebagai salah satu media dalam perbandingan/menambahkan wawasan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi kesehatan puskesmas.